



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Kolonel H. Soetadji No. 01 Tanjung Selor, Kode Pos. 77212

Website : www.kaltaraprov.go.id Email : kaltaraprov@gmail.com

Tanjung Selor, 2 September 2025

Nomor : 900.1.1/3456/BKAD/SETDA
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2026 Kabupaten Malinau dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026

Yth. Bupati Malinau

di -
Tempat

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan penilaian atas kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).
2. Terlampir disampaikan hasil penilaian Keselarasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2026 Kabupaten Malinau dengan KEM PPKF Tahun 2026.
3. Berdasarkan hasil penilaian keselarasan dimaksud, pemerintah kabupaten/kota melakukan penyempurnaan atas rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dilakukan pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD, hasil penyelarasan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Gubernur Kalimantan Utara
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Utara,



Dr. BUSTAN S.E., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197406301996031003

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Utara (Sebagai Laporan);
2. Wakil Gubernur Kalimantan Utara;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara;
4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan c.q Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri

KERTAS KERJA PENYELARASAN

RANCANGAN KUA DAN RANCANGAN PPAS TA. 2026 KABUPATEN MALINAU DENGAN KEM PPKF TAHUN 2026

A. SASARAN MAKRO KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026

URAIAN	TARGET	NILAI	KETERANGAN
Pertumbuhan Ekonomi	2,52	4,31	belum selaras dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. Rekomendasi : agar diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.
Tingkat Kemiskinan	7,03	6,33	belum selaras dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. Rekomendasi : agar diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026.

B. PENYELARASAN NARASI KUA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2026

URAIAN	STATUS	KETERANGAN
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	selaras	Terhadap indikator rinci strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kab. Malinau Tahun 2026 diantaranya infrastruktur dasar untuk mendorong mobilitas, konektivitas dan produktivitas. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM dan dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi pasar produk dan sertifikasi yang memadai.
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	selaras	Terhadap indikator rinci strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pendapatan daerah diantaranya pendapatan yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan sebesar 50% untuk memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat serta Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi mengakses skema sinergi pendanaan dan pembiayaan kreatif untuk penyediaan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.
Ketahanan (Perikanan) Pangan	belum selaras	Terhadap indikator rinci strategi kewilayahan, narasi KUA belum menjabarkan dukungan untuk peningkatan

			produktivitas perikanan. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi daerah meningkatkan produktivitas perikanan, mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan, dan optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.
Ketahanan Pangan (Pertanian)	Pangan	selaras	Terhadap indikator rinci strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kab. Malinau Tahun 2026 diantaranya infrastruktur dasar untuk mendorong mobilitas, konektivitas dan produktivitas. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan dibandingkan tarif untuk lahan lainnya.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	selaras	Terhadap indikator rinci strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan pada Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah diantaranya mengedepankan belanja yang mendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), sistem pengelolaan mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Pendidikan Pendidikan Tinggi)	(SPM	selaras	Terhadap detail indikator strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah diantaranya mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan yang dikhususkan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib Belajar Malinau Maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun dan Program Kepala Daerah lainnya seperti Desa Sarjana Unggul, Milenial Mandiri, SAGET (Smart Government). Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara fokus daerah lain untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran koding dan AI

a.n Gubernur Kalimantan Utara
Pj. Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Utara,



Dr. BUSTAN S.E., M.Si
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197406301996031003

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2025

Kode Satker : 980269

Nama Pemda : Kab. Malinau

Verifikator :

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Belum ada data.			

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)		
Ketahanan Pangan (Perikanan)		
Ketahanan Pangan (Pertanian)		
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)		
Penguatan Wellbeing (Kemiskinan)		
Penguatan Wellbeing (Stunting)		

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahian	Detail Indikator Strategi Kewilayahian	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	Peningkatan rasio rata-rata belanja modal sekitar 1-4,5% baik untuk jangka pendek maupun jangka menengah demi pemenuhan belanja wajib infrastruktur Insentif investasi dari Pemda untuk masyarakat dan/atau investor				
Ketahanan Pangan (Perikanan)					
Ketahanan Pangan (Pertanian)					
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)					
Penguatan Wellbeing (Kemiskinan)		kk1556			
Penguatan Wellbeing (Stunting)		kk1557			

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

PDRD

Hasil Evaluasi Penyelarasan KEM-PPKF dan KUA-PPAS 2026

Kode Satker : 980269

Nama Pemda : Kab. Malinau

Verifikator : Provinsi Kalimantan Utara

A. Target Makro

Uraian	Target	Nilai KUA	Keterangan
Pertumbuhan Ekonomi	2.52	4,31	belum selaras dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. Rekomendasi : agar diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026
Tingkat Kemiskinan	7.03	6,33	belum selaras dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026. Rekomendasi : agar diselaraskan dengan target yang tercantum dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026

B. Penyelarasaan Narasi KUA

Uraian	Status	Keterangan
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kab. Malinau Tahun 2026 diantaranya infrastruktur dasar untuk mendorong mobilitas, konektivitas dan produktivitas. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM dan dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi pasar produk dan sertifikasi yang memadai.
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pendapatan daerah diantaranya pendapatan yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan sebesar 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat serta Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi mengakses skema sinergi pendanaan dan pembiayaan kreatif untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.
Ketahanan Pangan (Perikanan)	belum selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayahan, narasi KUA belum menjabarkan dukungan untuk peningkatan produktivitas perikanan. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi daerah meningkatkan produktivitas perikanan, mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan, dan optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.
Ketahanan Pangan (Pertanian)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kab. Malinau Tahun 2026 diantaranya infrastruktur dasar untuk mendorong mobilitas, konektivitas dan produktivitas. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan dibandingkan tarif untuk lahan lainnya.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan pada Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah diantaranya mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), sistem pengelolaan mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah diantaranya mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan yang difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib Belajar Malinau Maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun dan Program Kepala Daerah lainnya seperti Desa Sarjana Unggul, Milenial Mandiri, SAGET (Smart Government). Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran coding dan AI

C. Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Uraian	Nilai	Keterangan
Belum ada data.		

D. Mandatory Spending

Uraian	Status	Keterangan
Mandatory Spending		
PDRD		

Lampiran 2

Penyelarasaan Narasi KUA

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayahan	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Akselerasi Investasi (Pertumbuhan Ekonomi)	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan reformasi tata kelola investasi daerah melalui digitalisasi pengelolaan keuangan dalam proyek investasi publik; Fasilitasi diversifikasi ekonomi dan meningkatkan alokasi belanja infrastruktur dalam mendukung hilirisasi komoditas lokal dengan adopsi teknologi yang dibutuhkan; Penguatan kawasan sentra produksi yang berkualitas sehingga harga komoditas andalan lebih stabil (kelapa sawit, udang, kepiting, rumput laut, batubara, bijih besi, dan intan); Mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM; Dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi market produk dan sertifikasi yang memadai; Menjaga kepuatan pemenuhan earmarking PKB dan opsen PKB untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, untuk mendukung konektivitas. 	none	Pemda Kab. Malinau telah menarasikan dalam rancangan KUA dalam asumsi dasar penyusunan APBD (pada halaman 16, 18, 49, 56, 64)	selaras	<p>Terhadap detil indikator strategi kewilayahan, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kab. Malinau Tahun 2026 diantaranya infrastruktur dasar untuk mendorong mobilitas, konektivitas dan produktivitas.</p> <p>Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi mendorong belanja untuk mendukung kapasitas tenaga kerja yang selaras dengan potensi daerah serta kewirausahaan UMKM dan dukungan pada UMKM pada pembiayaan, digitalisasi pasar produk dan sertifikasi yang memadai.</p>

Indikator Strategi Kewilayahan	Detail Indikator Strategi Kewilayah	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Kesehatan (Indeks Kesehatan)	<ul style="list-style-type: none"> Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar kesehatan, dengan peningkatan kualitas untuk penanganan stunting dan penguatan layanan kesehatan; Peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD, antara lain melalui pemutakhiran NJOP sesuai dengan kondisi wilayah.; Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan; Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana kesehatan; Mengakses skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan. 	none	Pemda Kab. Malinau telah menarasikan dalam rancangan KUA dalam kebijakan belanja (pada halaman 13, 16, 18, 36, 49, 50, 57)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayah, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pendapatan daerah diantaranya pendapatan yang bersumber dari pajak rokok dialokasikan sebesar 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat serta Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah diantaranya dengan intensifikasi dan ekstensifikasi PDRD. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi mengakses skema sinergi pendanaan dan pembiayaan kreatif untuk percepatan penyediaan infrastruktur layanan dasar kesehatan.
Ketahanan Pangan (Perikanan)	<ul style="list-style-type: none"> Daerah perlu mengevaluasi belanja agar lebih efektif untuk meningkatkan produktivitas perikanan; Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; Optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan. 	none	Pemda Kab. Malinau telah menarasikan dalam rancangan KUA dalam asumsi dasar penyusunan APBD (pada halaman 7, 18, 25)	belum selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayah, narasi KUA belum menjabarkan dukungan untuk peningkatan produktivitas perikanan. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain strategi daerah meningkatkan produktivitas perikanan, mengedukasi nelayan tetntang teknologi dan inovasi perikanan, dan optimalisasi belanja untuk meningkatkan infrastruktur perikanan.

Indikator Strategi Kewilayah	Detail Indikator Strategi Kewilayah	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Ketahanan Pangan (Pertanian)	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan fiskal daerah misal sinergi pendanaan maupun creative financing antara lain untuk peningkatan infrastruktur; • Penyuluhan dan pendampingan untuk mengedukasi nelayan tentang teknologi dan inovasi perikanan; • Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya. 	none	Pemda Kab. Malinau telah menarasikan dalam rancangan KUA dalam kebijakan belanja (pada halaman 7, 13, 18, 22, 25, 49, 50, 51)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayah, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah Kab. Malinau Tahun 2026 diantaranya infrastruktur dasar untuk mendorong mobilitas, konektivitas dan produktivitas. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan dibandingkan tarif untuk lahan lainnya.
Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM (Tingkat Kemiskinan)	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan APBD untuk pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM Desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri; • Dukungan alokasi belanja infrastruktur di sektor perumahan untuk masyarakat.; • Meningkatkan kualitas dan kesempatan kerja untuk menekan angka pengangguran melalui belanja daerah untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM, dan infrastruktur layanan dasar; • Dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), pengelolaan sistem mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum; • Menjaga kepatuhan pemenuhan earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI guna mengurangi beban masyarakat miskin. 	none	Pemda Kab. Malinau telah menarasikan dalam rancangan KUA dalam asumsi dasar penyusunan APBD (pada halaman 10, 25, 36, 53, 62, 64)	selaras	Terhadap detil indikator strategi kewilayah, narasi KUA telah menjabarkan pada Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah diantaranya mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan. Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain dukungan APBD untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan penerangan jalan umum (PJU), sistem pengelolaan mitigasi bencana, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Indikator Strategi Kewilayah	Detail Indikator Strategi Kewilayah	Kata Kunci Penyelarasan	Narasi KUA	Selaras/Belum Selaras	Rekomendasi
Pendidikan (SPM Pendidikan Tinggi)	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran coding dan AI; • Prioritas Belanja Daerah dan pemanfaatan TKD untuk penyediaan layanan dasar pendidikan (unggulan dan vokasi) dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan; • Penguatan DAU earmarked dan evaluasi mandatory spending sektor pendidikan; • Penguatan perencanaan Sinergi Pendanaan dalam RPJMD/RKPD, untuk penyediaan sarana prasarana pendidikan ; • Melakukan skema sinergi pendanaan dan creative financing untuk peningkatan infrastruktur layanan pendidikan. 	none	<p>Pemda Kab. Malinau telah menarasikan dalam rancangan KUA dalam kebijakan belanja (pada halaman 57, 64)</p>	selaras	<p>Terhadap detil indikator strategi kewilayah, narasi KUA telah menjabarkan kebijakan pengelolaan belanja daerah diantaranya mengalokasikan 20 % dari total belanja untuk bidang pendidikan yang difokuskan pada pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing dan program WM (Wajib Belajar Malinau Maju) yaitu pengembangan dari program Wajib Belajar 16 tahun dan Program Kepala Daerah lainnya seperti Desa Sarjana Unggul, Milenial Mandiri, SAGET (Smart Government). Agar ditambahkan dalam narasi KUA antara lain fokus daerah untuk pengembangan inovasi pembelajaran dengan teknologi digital, pedagogi modern, dan pembelajaran coding dan AI</p>

Lampiran 3

Program Prioritas dan Kebijakan Fiskal Nasional

Indeks 1: Referensi

Klasifikasi	Jumlah Subkegiatan di Referensi	Jumlah Subkegiatan di PPAS	Skor
Belum ada data.			

Indeks 2: Unit Cost

	Anggaran	Penduduk	Unit Cost
Belum ada data.			

Indeks 3: Budget Optimizer

Klasifikasi	Nilai	Total Belanja	Persentase	Target Budget Optimizer	Skor
Belum ada data.					

Evaluasi

Skor Indeks	Keterangan
Belum ada data.	

Lampiran 4

Mandatory Spending

PDRD